

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Zakat Secara etimologis berasal dari kata dasar bahasa arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.<sup>1</sup> Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23. Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang tersebut orang yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 23. Tahun 2011 disebut dengan Mustahik.

Di dalam al-qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini mengidentifikasi urgensi zakat dalam kehidupan umat Islam. Adapun dalil tentang zakat yang diiringi oleh shalat diantaranya :

---

<sup>1</sup> Umrotul Khasanah , *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jakarta: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 34

<sup>2</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2011, *tentang pengelolaan zakat*, hlm. 2.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S. Al-Baqoroh, 2:43).<sup>3</sup>*

Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat karena kedua perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yakni perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial. Demikian pula halnya dengan shalat, shalat bertujuan menghindarkan kehidupan manusia dari *fakhsya* (kajahatan) dan *munkar* (kerusakan).

Berkaitan dengan munculnya Undang-Undang pengelolaan zakat yang baru, perlu kiranya Saya menjelaskan beberapa pasal yang mengalami perubahan. Dalam hal ini Undang-Undang yang lama tidak diatur secara spesifik mengenai keanggotaan, sehingga masyarakat masih memiliki kebebasan dalam mengelola zakat. Proses ini tentunya belum bisa terpantau oleh pihak negara sehingga diperlukanlah Undang-Undang yang baru guna mengefektifkan dan mengefisiensikan pengelolaan zakat di Indonesia.

Kelahiran UU No. 23. Tahun 2011 menandai era baru transformasi atau perubahan zakat nasional yang telah melahirkan

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lantera Abadi, 2010), hlm. 92

paradigma baru tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Dari Undang-Undang tersebut sudah sangat jelas bahwasanya pemerintah ingin menyaring lembaga zakat yang telah ada dengan persyaratan keanggotaan. Hal ini terbukti dalam Undang-Undang 23. Tahun 2011 BAB II pasal 8. Dalam pasal ini terbagi menjadi lima bagian, diantaranya:<sup>4</sup>

- 1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- 2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- 3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- 4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementrian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- 5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Adapun isi muatan rangkuman BAB II berisi tentang kelembagaan pengelola zakat, terdiri dari 16 pasal (pasal 5-20), mengatur tentang kelembagaan dan tata kerja organisasi serta keanggotaan BAZNAS Pusat, maupun Propinsi dan Kabupaten/Kota beserta tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan zakat, ketentuan tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan BAZNAS pada instansi pemerintah maupun swasta, pengaturan tentang

---

<sup>4</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2011. hlm. 4.

organisasi Lembaga Amil Zakat, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ kepada BAZNAS.

Dengan adanya Undang-Undang baru tentunya tidak mudah dalam proses penerapannya di Indonesia. Apalagi berkaitan dengan pengelolaan zakat harus resmi ditunjuk oleh pemerintah. Padahal masih banyak ditengah masyarakat pengeumpulan zakat yang dikelola oleh masyarakat yang tanpa ditunjuk oleh pemerintah. Oleh sebab itu perlu kiranya Saya meneliti strategi pelaksanaan penerapan Undang-Undang ini, sehingga harapannya hal yang positif bisa dijadikan contoh demi kemajuan perzakatan di Indonesia. Meski sebelumnya sudah terdapat Undang-Undang pengelolaan zakat No. 38 Tahun 1999. Dalam penjelasan UU tersebut pengelolaan zakat sebenarnya masih membebaskan masyarakat untuk mengelola hasil dari pendapatan zakat.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah memiliki kewenangan dalam mengelola perzakatan di Indonesia. Mengingat posisi pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi dari masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pelaksana tunggal baik dalam penarikan maupun pendistribusian dalam lembaga zakat. Dengan adanya peran penting seperti itu diharapkan pelaksanaan perzakatan yang ada di Indonesia sesuai dengan apa yang menjadi harapan oleh seluruh umat muslim dengan tujuan mengangkat derajat mustahik menjadi muzakki.

Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan berbagai tingkatan baik tingkat nasional, maupun ditingkat daerah yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan bentukan masyarakat yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>6</sup> Pengelolaan zakat bertujuan, diantaranya: *pertama*, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. *Kedua*, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>7</sup>

BAZ sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah sebagai tangan kanan langsung pemerintah, yang pembentukannya sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam keputusan Dirjen Bimas Islam (direktur jendral bimbingan masyarakat) dan Urusan haji No. D/291 Tahun 2001 Memiliki peran penting dalam proses mengelola perzakatan di Indonesia. Pengelolaan zakat sudah seharusnya memanfaatkan manajemen sebagai sarana untuk mencapai tujuan penunaian zakat. Selain itu, ia juga seharusnya

---

<sup>5</sup> Mufidah, "Sistem Hirarki kelembagaan Badan Pengelola Zakat di Indonesia, tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No. 23. Tahun 2011", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta, *Jurnal Cita Hukum*, Tahun 2016, Vol. 4, No. 2, hlm.323.

<sup>6</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2011, hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

menjalankan fungsi-fungsi manajemen agar kinerja pengelolaan zakat dapat dicapai secara efektif dan efisien. Bahkan BAZ dan LAZ pun dengan sendirinya dituntut untuk mempertajam orientasi pengelolaan zakat agar dari waktu ke waktu kinerja pemberdayaan umat melalui pemanfaatan dana zakat bisa berkembang secara lebih sehat dan dampak positifnya semakin bisa dirasakan segenap masyarakat, khususnya oleh muzakki dan mustahiq dan lebih jauh lagi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan umat dan masyarakat pada umumnya.<sup>8</sup>

Sejauh ini dengan adanya zakat ditengah-tengah masyarakat memang memiliki harapan yang baik, yakni ingin merubah derajat mustahiq menjadi setingkat muzakki. Namun hal demikian tidak semudah mewujudkan harapan itu. Tentunya hal dikarenakan pengelolaan zakat yang bagi penulis belum dijalankan semaksimal mungkin.

BAZNAS Karanganyar merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah Karanganyar yang berfungsi sebagaimana BAZ yang lain. Tidak hanya sekedar menjadi suatu lembaga penghimpun dana zakat melainkan menjadi suatu lembaga yang mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat yang tergolong delapan *asnaf*. BAZNAS Karanganyar adalah salah satu BAZNAS yang besar dan tertib dalam hal pengelolaan zakat. Hal ini terbukti

---

<sup>8</sup> Umrotul Khasanah, hlm. 68-69

dengan prestasi penghimpunan dana yang besar yang dilakukan oleh BAZNAS Karanganyar. Sehingga menjadi ketertarikan bagi Saya untuk meneliti dari apa-apa yang positif yang dilakukan oleh BAZNAS Karanganyar untuk dicontohkan kepada BAZNAS yang lain.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat di nasional, penulis akan merujuk pada UU tersebut dalam pengelolaannya ditingkat BAZ. Sekiranya penting bagi penulis dalam meneliti strategi pelaksanaan penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana strategi pelaksanaan penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar ?
2. Apakah pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh BAZNAS Karanganyar.

2. Untuk menjelaskan pelaksanaan penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tentang kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah atau memperkaya khazanah disiplin ilmu, tentang perzakatan di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif yaitu sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada lembaga BAZ atau LAZ dan masyarakat pada umumnya tentang Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan atau *Field Research*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Dalam proses penelitian Saya akan menggali informasi dan data sebanyak-banyaknya dari instansi terkait. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif.



## 2. Tempat dan Objek Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan penelitian adalah BAZNAS kabupaten Karanganyar menjadi objek penelitian atau sumber utama untuk memperoleh informasi adalah Direktur BAZNAS Karanganyar. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan langsung mengamati proses pengelolaan di BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.<sup>10</sup> Namun sebelumnya peneliti akan membuat daftar pertanyaan wawancara hal ini dilakukan agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan apa yang peneliti harapkan. Adapun yang akan Saya wawancarai adalah direktur BAZNAS Karanganyar.

---

<sup>9</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 105

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.<sup>11</sup>

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahannya yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.<sup>12</sup> Dokumen tersebut berupa buku laporan BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

## **4. Metode Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>13</sup> Untuk menggambarkan secara tepat tentang strategi pelaksanaan penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

---

<sup>11</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 207.

<sup>12</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 183.

<sup>13</sup> Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3